

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Patrialis, *Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD tahun 1945*, Jakarta : Sinar Grafik, 2013
- Ashiddie Jimly, *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI, 2004
- Ashiddie Jimly, *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perkembangan dalam praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2019
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang – Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Asshiddiqie Jimly, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta, 1997), dikutip oleh I Dewa Gede atmadja, *hukum konstitusi*, Malang: Setara Press, 2012
- Fatkhoroehman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran hukum Dr. Harjono*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Kusnadi Moh, Bintan R, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008

- Kusnardi Moh , Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, Buku I: *Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan UUD 1945*, Jakarta: MPR RI, 2004
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : jenis, fungsi dan materi muatan*, Jakarta : PT Kanisius , 2007
- Mas Marwan, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Palguna I Dewa Gede, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008
- Rosidin Utang, Pengantar *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2018
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Jakarta : asosiasi pengajar hukum acara mahkamah konstitusi, 2010
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010
- Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, 2012
- Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2013
- Thaib Dahlah, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012

Thalib Abdul Rosyid, *Wewenang Mahkamah konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

JURNAL/ SKRIPSI/ MAKALAH

Antari Putu Eva Ditayani, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No. 2, 2020

Darmadi Nanang Sri, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum*, vol. XXVI, No. 2, Fakultas Hukum UNISSULA, 2011

Dedeng, "Amar Putusan Pada Kewenangan Judiccal Review di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Doly Denico dan Noverdi Puja Saputra, "Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," *jurnal hukum*, Vol. XII, No. 17, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020

Huda Ni'matul, "Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaian di Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2017.

Kholik David, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang Keterwakilan Perempuan di Parlemen", Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Banten, 2019.

Maulidi Agus, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, Naskah Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas hukum Universitas Indonesia, 08- 04- 2019

Nugraha Harry Setya, “Gagasan Amandemen Ulang Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Gagasan Amandemen*, Vol. 01 No. 1, 2018

Putra Afriyan, “Conditional Final and Binding terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019

Qamar Nurul, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Fakultas Hukum Muslim Indonesia Makassar, 2015

Rahmat Robuwan, “Redistribusi Kekuasaan Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara di Indonesia” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. XII No. 1, 2018

Rajab Achmadudin, “Peran Penting Badan Keahlian DPR RI dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung Terwujudnya Keadilan untuk Kedamaian” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 2, Pusat Perancangan UU Bada Keahlian DPR RI, 2017

Safa’at Muhchamad Ali, “Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma dalam Undnag-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 07 No. 1, 2010

Santrio, “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) pada Kantor Distrik Okhika”, 2019

Satrio Abdurrachman,” Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization of politics”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2015.

Soemantri Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni 1986

Soeroso Fajar Laksono, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Vol 11 No. 1, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah konstitusi, 2014

Solihah Ratnia, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014 : Permasalahan dan Upaya Mengatasinya” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2 No.2, 2016

Sugiman, “Fungsi Legislasi DPR pasca Amandemen UUD 1945” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2020

sunarto, “Fungsi Legislasi DPR pasca Amandemen UUD 1945” *Jurnal Integralistik*, No. 1/th. XXVIII, 2017

Susanto Nur Agus, “Tirani Konstitusional,” *Jurnal yudisial*, vol. 06, No. 3, Pegawai Komisi Yudisial, 2013

INTERNET

Andri Saubani, “Dihapusnya Pasal 59 ayat 2”, <https://Republika.co.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

<https://kbbi.web.id/amendemen>, diakses tanggal 16 Juli 2021

<https://typoonline.com/kbbi/penghapusan>, diakses tanggal 05 Juli 2021

Laksono Fajar, “menampik logika soal putusan MK”,
www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 04 Maret
2021

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara
Pengawal Konstitusi <https://www.mkri/>, diakses pada
tanggal 13 Juni 2021. (internet)

Redaksirltv, “Polemik Pasal MK Dihapus”
<https://radartvnews.com> diakses pada Tanggal 18 April
2021

Redaksirltv, “Polemik Pasal MK Dihapus”
<https://radartvnews.com> diakses pada Tanggal 18 April,
2021

Saubani Andri, “Dihapusnya Pasal 59 Ayat 2 UU MK”
www.Republika.co.id diakses pada Tanggal 06 Agustus
2021

UNDANG-UNDANG/ PERATURAN/ KEPUTUSAN

pasal 10 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi

Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945

Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

pasal 24C ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi

Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945

pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

pasal 59 ayat 2 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah konstistusi nomor 49/PUU-IX/2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B Ayat (1) dan Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Huruf D angka 192 dan 198 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 67 dan Pasal 68

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

